



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 / KPTS / 2025

TENTANG

REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pembahasan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan II telah menghasilkan rekomendasi yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II.
- KESATU : Rekomendasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 8 Juli 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ENDANG SRI SUMIYARTINI

Tembusan :
Gubernur D.I. Yogyakarta sebagai laporan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7/KPTS/2025
TENTANG
REKOMENDASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TERHADAP PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
TRIWULAN II

Pengawasan Kinerja OPD Triwulan II merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melihat dan proses evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 mengusung Tema **“Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul”**.

1. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 adalah:
 - 1) Peningkatan Ekonomi.
 - 2) Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrem, dan Penanganan Stunting.
 - 3) Ketahanan Pangan.
 - 4) Peningkatan Kualitas SDM.
 - 5) Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
 - 6) Ketentraman dan Ketertiban, dan
 - 7) Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 adalah:
 - 1) Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat;
 - 2) Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat;
 - 3) Derajat kualitas SDM meningkat;
 - 4) Angka pengangguran dan Jumlah penduduk miskin menurun;
 - 5) Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat;
 - 6) Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan;
 - 7) Nilai investasi meningkat;

Berikut isu/permasalahan/hasil pengawasan Kinerja OPD pada masing-masing komisi:

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.	Kewaspadaan terhadap musim kemarau yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan kekurangan air.	1a	Mendorong BPBD bersama instansi terkait untuk meningkatkan 2ecret peringatan dini kebakaran lahan dan kekeringan, termasuk 2ecret rutin di daerah rawan serta pelibatan masyarakat dalam 2ecret pelaporan cepat.
				1b	Sosialisai optimalisasi embung, sumur resapan, dan 2ecret air sebagai cadangan sumber air bersih, terutama di wilayah yang rentan kekeringan.
		2.	Masih sering terjadi kasus wisatawan terseret ombak di kawasan pantai selatan Gunungkidul	2a	BPBD perlu memasang lebih banyak papan peringatan bahaya, menyosialisasikan zona rawan ombak, serta mengembangkan 2ecret informasi cuaca dan kondisi laut yang mudah diakses oleh wisatawan, termasuk melalui media 2ecret dan aplikasi pariwisata.
				2b	Mendorong BPBD untuk meningkatkan koordinasi dan peningkatan kapasitas pelatihan tanggap darurat kepada petugas dan komunitas lokal agar dapat merespons cepat saat terjadi insiden di laut.
2.	Dinas Komunikasi dan Informartika	1.	Beredarnya berbagai isu dan informasi tidak akurat (hoaks) di masyarakat, terutama melalui media sosial dan platform digital	1a.	Mendorong Diskominfo untuk meningkatkan pemantauan isu-isu yang beredar di media sosial serta memberikan informasi yang benar untuk mencegah

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
					diinformasi di masyarakat.
				1b.	Mendorong Diskominfo untuk meningkatkan edukasi literasi digital secara rutin kepada masyarakat, pelajar, dan perangkat desa untuk meningkatkan kesadaran dalam memilah informasi
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Masih banyak reklame yang melanggar Perda dan Surat Edaran (SE) Bupati, termasuk reklame yang sudah habis masa berlaku pajaknya namun belum ditertibkan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan daerah.	1a.	DPRD mendorong Satpol PP untuk peningkatan operasi rutin untuk menertibkan reklame ilegal dan reklame yang telah habis masa pajaknya
				1b.	Peningkatan sosialisasi regulasi reklame secara intensif kepada pelaku usaha, biro iklan, dan masyarakat dan mendorong pelibatan warga dalam pengawasan partisipatif melalui kanal pelaporan publik, seperti aplikasi aduan atau media sosial resmi pemerintah daerah.
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan masih rendah	1a.	Peningkatan sosialisasi dan layanan jemput bola perekaman IKD
				1b.	Mengoptimalkan peran perangkat desa dan kader masyarakat untuk mendorong kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam melengkapi dokumen kependudukan.

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB)	1.	Proses penerimaan pamong baru di tingkat kalurahan belum sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan potensi kecurigaan masyarakat terhadap adanya praktik nepotisme, kolusi, atau manipulasi hasil seleksi.	1a.	Melibatkan unsur independen seperti tokoh masyarakat, akademisi, atau pengawas dari kecamatan untuk menjamin objektivitas proses seleksi.
				1b.	Pemerintah kalurahan wajib menyusun dan mengumumkan secara terbuka seluruh tahapan seleksi pamong, termasuk jadwal, syarat, dan penilaian.
6	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pendidikan Daerah (BKPPD)	1	Masih banyaknya pegawai perangkat desa/ ASN yang tidak ada di jam kerja, di sisi lain sebagian pegawai memiliki tingkat kesibukan dan dedikasi yang tinggi	1a.	Peningkatan pengawasan langsung oleh atasan untuk memastikan kedisiplinan jam kerja.
				1b.	Peningkatan program kegiatan untuk pamong desa/dukuh untuk mengisi waktu luang agar lebih produktif dalam bekerja
				1c.	Melakukan evaluasi beban kerja secara berkala agar pembagian tugas lebih proporsional dan adil, menghindari ketimpangan antara pegawai yang aktif dan pasif.
7	Sekretariat Daerah	1	Banyaknya Pelanggaran yang di lakukan oleh Pegawai/ASN/Perangkat Kalurahan,dsb	1a	Peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan solusi dalam penyelesaian berbagai pelanggaran, baik yang berkaitan dengan norma hukum,

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
					norma sosial, maupun norma lainnya.
8	DPTR	1	Masalah Review RTRW, bagaimana kendala dan bagaimana dalam Penyelesaian Masalah yang terjadi	1a	Perlu melakukan koordinasi antar sektor untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih Kepentingan.
9	Badan Kesbang Pol	1	Banyaknya Ormas yang ada di Gunungkidul, Apakah data tentang Jumlah Ormas dan Permasalahan-permasalahan konflik di Masyarakat, sudah terselenggara dengan baik.	1a	Melakukan Pembinaan serta Pengawasan Ormas secara berkelanjutan.
10	Inspektorat Daerah	1	Maraknya pelanggaran norma yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang dilakukan perangkat desa/ASN	1a.	Mendorong pelaksanaan sosialisasi rutin setiap hari Senin yang memuat kode etik, budaya kerja, dan peraturan kepegawaian untuk membentuk aparatur yang disiplin dan berintegritas
				1b.	Peningkatan pembinaan kepada perangkat desa/ASN untuk mencegah permasalahan terjadi berulang
				1c.	Peningkatan sistem penilaian kinerja 360 derajat bagi perangkat desa dan ASN untuk memperoleh evaluasi yang lebih objektif melalui umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan masyarakat.
11	Sekretariat DPRD	1	Rendahnya serapan anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terutama karena belum optimalnya pelaksanaan kegiatan DPRD seperti bimtek, publikasi, serta kegiatan reses yang	1	Peningkatan penyesuaian dan percepatan jadwal kegiatan DPRD, terutama untuk kegiatan bimtek, publikasi, dan reses, agar serapan anggaran dan target kinerja dapat tercapai sesuai rencana.

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
			tertunda, sehingga terjadi deviasi anggaran cukup besar dari target		
		2	Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dan OPD terkait dalam penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dengan peraturan terbaru dari pemerintah pusat, sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa secara, pelaksanaan program tepat waktu dan sesuai ketentuan.		DPRD mendorong sekretariat DPRD untuk meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait penyesuaian SHBJ dengan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Tingginya tunggakan pajak, yang menyebabkan angka piutang pajak daerah tinggi	1.	Pemerintah daerah perlu melakukan kajian dan perhitungan ulang terhadap potensi piutang pajak daerah
				2.	Penagihan piutang pajak agar di dapat dilunaskan pada tahun ini
				2.	Melakukan pendekatan lebih awal terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk sengketa atau potensi permasalahan pajak yang muncul
				3.	Melakukan Pengawasan preventif terhadap pihak yang berkaitan dengan pemungutan pajak dari tingkat Pemerintah Daerah hingga ke Padukuhan
				4.	Meningkatkan/memperbanyak reward berbasis infrastruktur terhadap pemungutan pajak yang baik di tingkat kalurahan
				5.	Meningkatkan pengawasan, kajian dan penindakan pada wilayah

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
					yang tidak tercapai targetnya
				6.	Mengoptimalkan aplikasi SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak) Daerah untuk optimalisasi pembayaran pajak
				7.	Melakukan validasi data wajib pajak yang bermasalah disetiap kalurahan
				8.	Membentuk Tim Pemungutan dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi peran Perangkat Desa
		2.	Belum optimalnya pemutakhiran data Pajak	1.	Pengintegrasian data dalam sistem satu data daerah antara Notariat-BPN- Kalurahan
				2.	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran fasilitas/infrastruktur database pajak dan updating data pajak setiap tahunnya
				3.	Fasilitasi sumberdaya pengelola data perpajakan
				4.	Transparansi realisasi dan penggunaan pembangunan yang berasal dari pajak
				5.	Mengoptimalkan aplikasi SIPAPAH (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah) untuk optimalisasi integrasi data
				6.	Perlu adanya pemetaan permasalahan yang menyebabkan adanya tunggakan pajak
		3.	Terjadinya kesalahan pencatatan data pajak	1.	Pemutakhiran fasilitas/infrastruktur database pajak
				2.	Melakukan sistem transparansi pengawasan berbasis informasi dan data

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
				3.	Fasilitasi ruang pengaduan dan percepatan penanganan
				4.	Mendorong agar pemerintah daerah membentuk sistem terintegrasi antara Notariat-Kalurahan-BPN-BKAD
		4.	Belum optimalnya pengawasan/kedisiplinan kepada wajib pajak	1.	Pemerintah daerah bagian perpajakan perlu melakukan kajian dan
				2.	Melakukan kerja gabungan (Kerjasama lintas OPD-Lembaga) lebih intens terutama lembaga pengawas inpektorat, Satpol PP, Kejaksaan, KPK dan Kepolisian yang sesuai dengan sektor objek pajak
				3.	Peningkatan anggaran dan kegiatan edukasi kepada wajib pajak
		5.	Permasalahan penyelewengan pajak oleh oknum penarikan pajak	1.	Menindak tegas oknum pelaku penarikan yang melakukan penyelewengan pajak
				2.	Meningkatkan strategi pemungutan sistem "jemput bola" mendekatkan lembaga pembayaran ke tingkat lokal
				3.	Melakukan edukasi dan pelatihan sistem kepada pemungut pajak di tingkat lokal/Kalurahan/Kelurahan
				4.	Melakukan pengawasan pemungutan secara bertingkat dari tingkat lokal hingga daerah
13.	BPN/ATR	1.	Peta ploting PBB-P2 yang tidak update	1.	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan baru
		2.	Adanya kesulitan untuk mengupdate data kepemilikan tanah	1.	Memberikan kemudahan kepada masyarakat-kalurahan untuk mengupdate ploting tanah diwilayah

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
				2.	Mendorong agar pemerintah daerah dan BPN melakukan sosialisasi terkait E-sertifikat agar mempermudah updating data
		3.	Belum optimalnya pemutakhiran pajak	1.	Melakukan sinergi dan integrasi data dengan Notariat-Kalurahan-BKAD untuk pemutakhiran data pajak
				2.	Melakukan pemutakhiran data setiap tahunnya
14.	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.	Belum adanya Kebijakan terkait pemungutan pajak	1.	Melakukan kajian hukum terkait dengan kebijakan pemungutan pajak
				2.	Melakukan kajian hukum terkait dengan reward dan Punishment untuk penarik pajak
				3.	Melakukan kajian hukum terkait dengan kebijakan penyalahgunaan kewenangan sebagai pemungut pajak
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.	Belum optimalnya pemmanfaat lahan	1.	Melaksanakan Inventarisasi dan Pemetaan Teknis Lahan Potensial untuk Pertanian
				2.	Menyusun dan Memfasilitasi Skema Kemitraan Pengelolaan Lahan Pertanian
				3.	Penguatan Pengawasan Tata Ruang dan Penegakan Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
				4.	Penguatan Infrastruktur Teknis Pertanian untuk Meningkatkan Produksi
				5.	Aksesibilitas Sarana Produksi yang Terjangkau bagi Petani
				6.	enguatan Peran Penyuluh dan Pendamping Lapangan dalam Meningkatkan Kapasitas Petani

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
		2.	Menurunnya ketersediaan lahan pertanian akibat perubahan peruntukan lahan	1.	Penguatan Pengawasan terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang dan LP2B
				2.	Pemutakhiran Data Lahan Pertanian secara Digital dan Berkala
				3.	Pengakuan Hukum terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan
				4.	Advokasi dan Insentif bagi Pemilik Lahan agar Tetap Menjaga Fungsi Pertanian
16.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Adanya kesulitan mendapatkan registrasi kelompok peternak	1.	Mendorong pemerintah daerah mempercepat penggabungan DPP dan DPKH agar registrasi kelompok peternak dapat dilakukan
		2.	Menurunnya jumlah produksi peternakan	1.	Monitoring Ketersediaan dan Kualitas Pakan Ternak
				2.	Penguatan Pengawasan Kesehatan dan Reproduksi Ternak
				3.	Evaluasi Produktivitas per Wilayah Peternakan
				4.	Penyaluran Bantuan Sarana Produksi secara Tepat Sasaran
		3.	Terjadinya peningkatan kasus antraks dan penyakit hewan lainnya pada ternak di wilayah Gunungkidul.	1.	Penguatan Sistem Pengawasan dan Isolasi Wilayah Terpapar Penyakit Menular Hewan
				2.	Pendampingan Teknis dan Penguatan Layanan Kesehatan Hewan di Wilayah Rawan
				3.	Pengawasan dan Fasilitasi Pengadaan Bibit Ternak Unggul
				4.	Pelaksanaan Program Vaksinasi Ternak Secara Rutin dan Gratis
17.	Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	1.	Kegiatan Jica (Japan Internasional Cooperation Agency)	1.	Keberlangsung Kerjasama dengan pihak jepang terkait ketenagakerjaan

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
18.	DPUPRKP	1.	<p>Realisasi belanja hingga TW II baru mencapai Rp13.231.111.661 atau 23% dari pagu dan 50,83% terhadap target renkas.</p> <p>a. Realisasi tertinggi berasal dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai realisasi Rp5.524.112.267 atau 41,69% dari pagu dan 76,09% dari target renkas</p> <p>b. Realisasi terendah tercatat pada Bidang SDA (Sumber Daya Air) dengan realisasi hanya Rp106.140.000 atau 7,13% dari pagu dan 42,75% dari renkas</p>	1a	DPRD mendorong DPUPRKP untuk melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, mengingat realisasi belanja baru mencapai 23% dari pagu dan 50,83% dari target renkas, yang tergolong rendah untuk pertengahan tahun anggaran.
				1b	Bidang Sumber Daya Air (SDA), sebagai unit dengan realisasi terendah (7,13% dari pagu), agar segera melakukan evaluasi internal dan mempercepat pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, proses administrasi pengadaan, maupun pelaksanaan fisik.
		2.	<p>Realisasi pendapatan hingga TW II mencapai Rp194.764.350 atau 27,02% dari pagu dan 61,14% dari target renkas.</p> <p>a. Retribusi Penyedotan Kakus menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar Rp33.492.000 (42,24% dari pagu dan 95,57% dari renkas), serta Retribusi Penyewaan Bangunan (Rusun) telah mencapai Rp129.842.350 (34,35% dari pagu dan 68,69% dari renkas).</p> <p>b. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran,</p>	2.	DPRD mendorong DPUPRKP untuk menyusun langkah konkret terhadap Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri yang hingga saat ini belum menunjukkan realisasi sama sekali agar tidak terjadi kegagalan target pendapatan di akhir tahun.

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
			dan Industri belum menunjukkan realisasi sama sekali.		
		3.	Dampak rencana kebijakan zero ODOL (<i>Over Dimension Over Loading</i>) yang memicu pengemudi angkutan barang menuntut penyesuaian SHBJ	3.	DPRD meminta DPUPRKP segera memberikan rekomendasi kepada BKAD terkait penyesuaian komponen biaya angkut dalam SHBJ material konstruksi guna menjamin kewajaran harga satuan pekerjaan
19.	Dinas Lingkungan Hidup	1.	Realisasi belanja sampai akhir Juni tercatat Rp 5.452.508.987 atau 29,30 % dari pagu Rp 18.607.030.403 a. Belanja modal DLH tercatat memiliki pagu sebesar Rp 6.117.667.645, namun hingga akhir Triwulan II baru terealisasi sebesar Rp 335.003.799, atau hanya 5,48% dari total pagu belanja modal.	1.	DPRD mendorong percepatan proses pengadaan dan pelaksanaan fisik untuk menghindari akumulasi pekerjaan di akhir tahun yang bisa berdampak pada rendahnya efektivitas anggaran
		2.	Realisasi Pendapatan Daerah hingga akhir TW II tercatat Rp 581.203.306 (57,53 % dari pagu Rp 1,01 miliar)	2.	DPRD merekomendasikan agar DLH melakukan percepatan pemungutan retribusi dengan memaksimalkan kinerja petugas lapangan serta memperluas jangkauan wajib retribusi melalui pendataan yang lebih akurat dan pemutakhiran database penerima layanan
		3.	Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan karcis sebagai alat pungut retribusi persampahan yang sah	3.	DPRD meminta DLH segera menyusun dan menetapkan SOP pemungutan retribusi yang komprehensif

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
		4.	Banyaknya variasi bentuk dan jenis karcis terkait penarikan retribusi yang diampu DLH sebagaimana diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.	DPRD mendorong DLH untuk melakukan evaluasi dan standardisasi bentuk serta jenis karcis retribusi, disertai sosialisasi yang jelas kepada petugas lapangan guna menghindari kebingungan dalam implementasi di lapangan
20.	Dinas Perhubungan	1.	Realisasi belanja Dinas Perhubungan sampai Juni 2025 mencapai Rp 12,32 miliar (50,33% dari pagu).	1.	DPRD mengapresiasi progres serapan anggaran namun menekankan pentingnya menjaga kualitas dan output belanja agar berdampak langsung pada pelayanan publik
		2.	<p>Realisasi pendapatan retribusi hingga akhir TW II tercatat sebesar Rp930.222.000 atau 40,86% dari pagu anggaran Rp2.276.750.000.</p> <p>a. Pendapatan terbesar berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp572.298.000 (46,97%)</p> <p>b. Realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir Kawasan Wisata mencapai Rp253.407.000 (29,74%).</p> <p>c. Realisasi retribusi Penyewaan Los dan Kios Terminal Tipe C Semin mencapai 135,58% dari pagu.</p> <p>d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Kawasan Ekonomi baru mencapai 47,59%, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir</p>	2.	DPRD merekomendasikan agar Dinas Perhubungan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber retribusi, terutama pada jenis retribusi dengan capaian rendah

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
			di Terminal Tipe C Semin sebesar 32,54%.		
		3.	Uji Kir telah digratiskan namun masih dirasa sulit untuk lolos uji oleh para pengusaha angkutan	1.	DPRD mendorong Dishub untuk melakukan evaluasi terhadap SOP pelaksanaan uji Kir demi memastikan tidak adanya hambatan administratif atau teknis yang tidak perlu
21.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana	1.	Belum terbitnya evaluasi Perda RTRW Kab. Gunungkidul	1.	DPRD meminta DPTR untuk menindaklanjuti hasil monitoring dari Kementerian ATR/BPN terkait 13 pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunungkidul
		2.	Belum adanya pembagian zonasi yang pakem untuk Kabupaten Gunungkidul	2.	DPRD merekomendasikan adanya pembagian zonasi area yang jelas dalam evaluasi RTRW untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.
		3.	Terdapat kasus status bangunan pemukiman lama masih lahan tegalan		DPRD merekomendasikan percepatan proses penyesuaian status penggunaan tanah dalam basis data pertanahan oleh DPTR dan Kantor Pertanahan BPN, terutama untuk kawasan permukiman eksisting yang belum terdata secara sesuai.
		4.	Menjamurnya bangunan liar di lahan Sultan Ground di Pantai Sanglen	4.	DPRD merekomendasikan DPTR untuk segera melakukan penertiban melalui koordinasi dengan Satpol PP sebagai bagian dari komitmen penataan kawasan pesisir

No	OPD	No	Permasalahan	No	Rekomendasi
					selatan dan memastikan pemanfaatan tanah SG sesuai dengan regulasi
		5.	Sertifikat tukar guling banyak yang belum keluar	5.	DPRD mendorong DPTR segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan BPN untuk memastikan daftar inventarisasi lengkap atas lahan yang telah dan belum bersertifikat untuk memastikan kejelasan status hukum bagi masyarakat
		6.	Masih minimnya informasi lahan/penggunaan lahan untuk kalurahan dalam bentuk peta dasar maupun peta tematik		DPRD mendorong DPTR untuk segera menginventarisasi/menyusun peta skala kalurahan, seperti peta batas wilayah, penggunaan lahan, dan jaringan jalan serta peta tematik (peta kawasan lindung, kawasan rawan bencana, dll.) secara bertahap di seluruh kalurahan.
22.	Bappeda	1.	Belum terbitnya evaluasi Perda RTRW Kab. Gunungkidul	1.	DPRD mendorong Bappeda meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memastikan komponen-komponen penting dalam dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terpenuhi
		2.	Minimnya dana sosialisasi terkait perizinan berusaha yang diampu oleh DPMPSTP	2.	DPRD mendorong Bagian Perencanaan Bappeda untuk mengusulkan anggaran yang memadai untuk sosialisasi perizinan berusaha mengingat pentingnya kegiatan ini

23.	Dinas Pendidikan	1.	Kualitas sumber daya manusia Gunungkidul masih rendah dibandingkan rata-rata DIY. Menurut data statistik, posisi IPM terendah ini tidak pernah berubah setidaknya dalam 10 tahun terakhir	1a.	Edukasi multitarget untuk peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan meliputi nilai penting pendidikan pada orang tua anak, peningkatan pendapatan keluarga, pemetaan murid sekolah, dan mentoring anak.
				1b.	Pemberian beasiswa pada anak pada keluarga kurang mampu dan program sekolah paket A dan B yang aktif dan menjangkau daerah paling terpencil.
				1c.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik di tingkat PAUD, SD, dan SMP termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sesuai kewenangan daerah
		2.	keterbatasan tenaga pengajar guru dan kepala sekolah	2.	pemetaan dan distribusi tenaga pengajar guru dan kepala sekolah berbasis kedekatan lokasi untuk mendukung pemerataan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri maupun swasta.
		3.	Sekolah mengalami penurunan rombongan belajar	3.	Evaluasi jaringan satuan pendidikan termasuk koordinasi dengan penyedia data anak usia pra sekolah untuk mendukung kebijakan Pendidikan
		4.	Program Makan Bergizi Gratis perlu dipersiapkan lebih baik	4.	Peningkatan koordinasi dengan OPD pengampu program untuk penyediaan basis data siswa, ibu hamil dan menyusui serta calon penerima manfaat program yang akurat dan berbasis prioritas.
24.	Dinas Perindustrian, Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja	1.	Belum tercapainya target penurunan angka pengangguran di tahun 2024 dan 2025	1.	Pengawasan dan evaluasi target pengurangan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja diiringi peningkatan

					SDM siap kerja berkualitas
		2.	Pelatihan kerja perlu dipersiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar lapangan kerja	2a.	Identifikasi jenis keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar dan inisiasi variasi pelatihan yang lebih beragam dan aplikatif
				2b.	Peningkatan jumlah fasilitas pelatihan yang disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diberikan.
25.	Dinas Kesehatan	1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat belum optimal	1.	Melakukan upaya peningkatan kesadaran promotif dan preventif dalam kesadaran kesehatan di masyarakat.
		3.	Terdapat 5.159 balita yang mengalami stunting di tahun 2025	3a.	Edukasi penanggulangan stunting sejak dini di tingkat posyandu, remaja putri dan khususnya pada ibu hamil dan orang tua balita.
				3b.	Peningkatan literasi gizi di kalangan orang tua melalui edukasi dan pelatihan praktik pemberian makan anak, serta optimalisasi program penyaluran makanan bergizi
				3c.	Distribusi makanan bergizi untuk penanganan stunting perlu diiringi dengan penyediaan sarana pendukung dan pemerataan kebutuhan PMT ke seluruh Posyandu dan sekolah di wilayah Gunungkidul.
		4.	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.	4a.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan.
				4b.	Kerjasama dengan institusi kesehatan
		5.	Ancaman penyakit menular dan Demam Berdarah (DBD) yang mencapai 330 kasus di tahun 2025.	5a.	Melakukan upaya efektif pencegahan DBD berupa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan melalui pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk khususnya

					Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Jumantik) diantaranya edukasi kebersihan lingkungan.
				5b.	Penyemprotan insektisida di daerah rawan DBD dan penyediaan bubuk abate.
26.	Dinas Sosial P3A	1.	Maraknya judi online dan pinjaman online	1a.	Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang bahaya judol dan pinjol
		2.	Masih adanya kasus gantung diri	2a.	Memperkuat kelompok - kelompok sosial masyarakat disertai dengan fasilitator dari Pemda sebagai ajang komunikasi agar terhindar dari rasa keterasingan
		3.	Peralihan DTKS menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Sosial (DTSen) berpotensi memicu konflik dimasyarakat	3a.	Koordinasi antar OPD untuk sinkronisasi data sesegera mungkin, untuk melindungi masyarakat Gunungkidul.
27.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.	Pengembangan ketersediaan Fasilitas dan sarana olahraga di lingkungan Masyarakat.	1a.	Melakukan pemetaan dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan sebaran fasilitas olahraga yang ada di lingkungan masyarakat.
				1.b	Membangun dan memperbaiki sarana secara merata, memanfaatkan ruang publik, serta melibatkan dukungan pemerintah dan swasta.
				1c.	Melakukan pengawasan dan pengecekan mengenai Pembangunan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
		2.	Memaksimalkan persiapan Fasilitas Sarana dan prasarana untuk persiapan PORDA DIY	2a.	Meningkatkan koordinasi dengan KONI Gunungkidul dan panitia PORDA DIY untuk memastikan fasilitas yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga.
				2b.	Melakukan pengecekan secara berkala mengenai

				perkembangan dan kesiapan pada setiap sarana prasarana yang akan digunakan untuk PORDA DIY agar sesuai dengan standar yang ditentukan.
		3.	Persiapan dan Pengembangan Publikasi mengenai PORDA DIY yang akan dilaksanakan.	3a. Melakukan Kerjasama dengan berbagai media guna memberikan informasi perkembangan PORDA DIY.
		4.	Memberikan penghargaan yang pantas seperti beasiswa, bonus prestasi, piagam penghargaan, atau fasilitas khusus kepada atlet serta siswa yang berprestasi.	4a. Memberikan apresiasi yang layak dalam bentuk beasiswa, bonus prestasi, piagam penghargaan, atau fasilitas khusus bagi atlet dan siswa berprestasi.
				4b. Mengembangkan program pembinaan jangka panjang bagi siswa dan atlet berprestasi melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas.
				4c. Mengangkat profil dan kisah sukses atlet/siswa berprestasi melalui media sosial, website resmi pemerintah, dan kegiatan seremoni agar menjadi inspirasi publik.
				4d. Memberikan support peralatan olahraga yang dibutuhkan, kepada siswa berprestasi.
28.	Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan)	1.	Anggaran kegiatan kebudayaan (Dana Keistimewaan) berkurang dan pemangkasan kegiatan festival berjenjang	1a. Menjalin komunikasi dengan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY dan Paniradya Kaistimewan DIY.
				1b. Mencari dukungan dana dari sumber lain seperti Dana Alokasi Khusus Non Fisik Taman Budaya
				1c. Mengoptimalkan kegiatan festival Kabupaten sebagai sarana peningkatan potensi serta pelestarian seni budaya.

		2.	Pelestarian Warisan budaya dan cagar budaya yang belum optimal	2.	Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya dioptimalkan, misal program wajib kunjung museum kuota ditambah.
		3.	Kegiatan Kebudayaan tradisional belum terakomodir	3.	Pembinaan Kalurahan Kantong Budaya menjadi Rintisan Kalurahan Budaya dan Rintisan Kalurahan Budaya menjadi Kalurahan Budaya.
		4.	Terbatasnya anggaran pendukung kegiatan kebudayaan di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		Peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan kebudayaan Dinas Kebudayaan
		5.	Belum optimalnya penggunaan Taman Budaya Gunungkidul.		Pengoptimalan Taman Budaya Gunungkidul sebagai media ekspresi seniman dan warga masyarakat Gunungkidul misal promosi event bekerjasama dengan biro wisata.
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.	Kurangnya minat baca masyarakat Gunungkidul dan minimnya literasi	1a.	Penyediaan pojok baca, terutama dikantor – kantor pelayanan public.
				1b.	Modorong setiap dusun untuk memiliki perpustakaan umum.
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	Peminat metode kontrasepsi jangka panjang MOP MOW lebih sedikit daripada metode kontrasepsi jangka pendek.	1.	Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pengoptimalan kelompok masyarakat seperti posyandu, kelompok bina keluarga, KWT, kelompok non formal di padukuhan (arisan RT bapak - bapak).
		2.	Kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia belum merata di setiap desa dan anggaran untuk kegiatan kelompok tersebut masih minim karena tergantung dari Dana DAK Pusat.	1a.	Kerjasama dengan kalurahan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, misal PKK, Karang Taruna

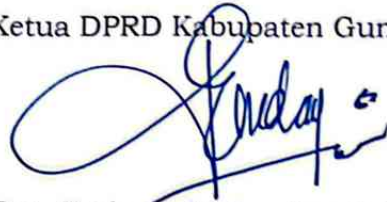
		3.	Lahan parkir di area RSUD wonosari	3a.	Melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan lahan parkir yang dibutuhkan, selanjutnya sebagai dasar pembangunan area parkir modern sehingga meningkatkan kenyamanan dan ketersediaan parkir.
				3b.	Kerjasama dengan penyedia parkir atau pihak ke tiga untuk meningkatkan ketersediaan parkir.
				3c.	RSUD Wonosari bisa mengusulkan Mengalokasikan anggaran baik BLUD atau APBD untuk pengadaan atau pembelian tanah untuk mengatasi masalah parkir seperti rmah sakit vertikal
10.	RSUD Saptosari	1.	PAD RSUD Saptosari masih kecil Pemenuhan SDM sebagai pendukung program membuka layanan Klinik sore	1.	RSUD Saptosari mencari terobosan untuk peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap sebagai upaya peningkatan BOR dengan membuka poli sore dan percepatan kredensial pelayanan ortophedi menjalin promosi agar layanan meningkat dan satu satunya Rumah sakit di gunungkidul berada di wilayah jalur wisata.
11.	BPJS Kesehatan Cabang Wonosari	1.	Masih kurangnya keaktifan keanggotaan BPJS.	1.	Melakukan inovasi kemudahan pembayaran secara sistem online maupun offline.
		2	Potensi penghapusan ribuan keanggotaan BPJS dari Gunungkidul di bulan Mei dan Juli	2a	Penguatan koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan data bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk layanan konsultasi dan pengaduan utnuk warga terdampak. Khususnya masyarakat miskin pada desil 1 sampai desil 5.

				1b.	Mendorong pemerintah kalurahan untuk dapat menganggarkan pembiayaan terkait kelompok bina - bina tersebut.
9.	RSUD Wonosari	1.	Kurangnya fasilitas Sarpras dan mesin HD (Hemodialisa) mengakibatkan antrian tunggu yang banyak.	1.	Pembangunan Gedung HD serta Menambah jumlah Tempat Tidur dan mesin HD untuk mengatasi antrian . penambahan jumlah mesin HD, bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak ke tiga.
		2.	Pemenuhan SDM sebagai pendukung program layanan KJSU (kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi)	2a.	Identifikasi kebutuhan SDM di RSUD Wonosari dilakukan Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan. Membuka kerjasama UGM untuk pemenuhan dokter spesialis melalui <i>Academic Health System</i> , atau bisa mengusulkan ke kemenkes tentang kebutuhan dokter spesialis melalui PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) dari program <i>Fellowship</i> .
				2b.	Melakukan kerjasama dengan akademi kesehatan, Universitas atau sejenisnya untuk mendapatkan sukarelawan tenaga kesehatan.
				2c.	Melakukan peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan yang ada sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan.
				2c	Melakukan penambahan Jumlah Nakes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit terutama pada UGD.

				2b	Untuk pasien dalam kondisi darurat, siapkan prosedur bypass cepat agar pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meski status BPJS masih tertunda aktivasi ulang
--	--	--	--	----	--

Wonosari, 8 Juli 2025,

Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul



Dra. Endang Sri Sumiyartini, M.A.P

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

Tanggapan:

Akan ditindaklanjuti.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



ENDANG SRI SUMIYARTINI

WAKIL KETUA



WULAN TUSTIANA

WAKIL KETUA



SUWIGNYO

WAKIL KETUA



HERI NUGROHO